

LAPORAN KEUANGAN TA. 2018



SKPD-TP

Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

DAN PERUMAHAN RAKYAT TA.2018

Periode 31 Desember 2018

Jl Madukoro Blok AA-BB
Semarang 50144

SKPD-TP
DINAS PU SDA TARU
PROVINSI JAWA TENGAH

Untuk Periode yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2018

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Skpd-Tp Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah Adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Ditjen Sumber Daya Air yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Skpd-Tp Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Skpd-Tp Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Semarang, Desember 2018
Kuasa Pengguna Anggaran
SKPD-TP Dinas PUSDATARU
Provinsi Jawa Tengah

Ir. Ketut Arsa Indrawatara Sp.1
NIP 19610424 199010 1 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2

Pernyataan Tanggung Jawab	3
Ringkasan	4
I.	L
aporan Realisasi Anggaran	6
II.	N
eraca	7
III.	L
aporan Operasional	8
IV.	L
aporan Perubahan Ekuitas	9
V.	C
atatan atas Laporan Keuangan	10
A.	P
enjelasan Umum	10
B.	P
enjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	22
C.	P
enjelasan atas Pos-Pos Neraca	24
D.	P
enjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	28
E.	P
enjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	32
F.	P
engungkapan Penting Lainnya	34
VI.	L
ampiran dan Daftar	35



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG

Jl. Madukoro Blok AA-BB Semarang Kode Pos 50144

Telp. 024-7608201, Fax. 024-7612334

Laman <http://www.pusdataru.jatengprov.go.id>

Surat elektronik pusdataru@jatengprov.go.id

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Laporan Keuangan Skpd-Tp Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Semarang, Desember 2018
Kuasa Pengguna Anggaran
Skpd-Tp Dinas PUSDATARU
Provinsi Jawa Tengah

Ir. Ketut Arsa Indrawatara Sp.1
NIP 19610424 199010 1 002

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Skpd-Tp Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2018 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 73.289.216 atau mengalami perubahan dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp 0 .

Realisasi Belanja Negara pada TA 2018 adalah sebesar Rp 88.765.366.450 atau mencapai 92.94 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 95.505.889.000

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2018. Nilai Aset per 31 Desember 2018 dicatat dan disajikan sebesar Rp5.526.035.822 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp43.937.525 ; Aset Tetap (neto) sebesar Rp4.903.354.705 ; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp578.743.592. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp. 5.526.035.822

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasional, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp73.289.216, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp88.916.229.680 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp(88.842.940.464). Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp34.250.996 dan sebesar Rp.0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp.(88.808.689.468).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2017 adalah sebesar Rp5.664.620.683 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp(88.808.689.468), dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp88.670.104.607 dan terdapat penurunan ekuitas sebesar Rp.(138.584.861) sehingga Ekuitas akhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah senilai Rp5.526.035.822.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2018 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**SKPD-TP DINAS PUSDATARUPROVINSI JAWA TENGAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 DAN 2017**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2018		% thd Angg	TA 2017
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	A.1.				
Penerimaan Negara Bukan pajak	A.1.1	-	76.342.112	0,00	56.942.604
JUMLAH BELANJA		-	76.342.112	0,00	56.942.604
BELANJA	B.1.				
Belanja Barang	B.1.1	95.505.889.000	88.765.366.450	92,94	92.241.019.890
JUMLAH BELANJA		95.505.889.000	88.765.366.450	92,94	92.241.019.890

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

SKPD-TP DINAS PUSDATARU PROVINSI JAWA TENGAH

NERACA

PER 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2018	2017
ASET			
ASET LANCAR			
Persediaan	C.1	43.937.525	33.040.600
Jumlah Aset Lancar		43.937.525	33.040.600
ASET TETAP			
Peralatan dan Mesin	C.2	3.462.091.102	3.462.091.102
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.3	5.006.171.797	5.863.187.545
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.4	(3.564.908.194)	(4.282.996.292)
Jumlah Aset Tetap		4.903.354.705	5.042.282.355
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.5	531.250.000	531.250.000
Aset Lain-Lain	C.6	244.386.480	244.386.480
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.7	(196.892.888)	(186.338.752)
Jumlah Aset Lainnya		578.743.592	589.297.728
JUMLAH ASET		5.526.035.822	5.664.620.683
EKUITAS			
Ekuitas	C.8	5.526.035.822	5.664.620.683
JUMLAH EKUITAS		5.526.035.822	5.664.620.683
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		5.526.035.822	5.664.620.683

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL
SKPD-TP DINAS PUSDATARU PROVINSI JAWA TENGAH
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2018	2017
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	73.289.216	56.942.604
JUMLAH PENDAPATAN		73.289.216	56.942.604
BEBAN			
Beban Persediaan	D.2	1.023.709.275	1.280.832.400
Beban Barang dan Jasa	D.3	3.415.502.150	3.668.631.900
Beban Pemeliharaan	D.4	81.064.380.969	84.158.130.440
Beban Perjalanan Dinas	D.5	3.263.155.500	3.387.447.250
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.6	149.481.786	170.368.113
JUMLAH BEBAN		88.916.229.680	92.665.410.103
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(88.842.940.464)	(92.608.467.499)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.7		
Surplus Penjualan Aset Nonlancar		-	-
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		-	-
Defisit Selisih Kurs		-	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		121.235.546	144.567.800
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		86.984.550	22.307.600
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		34.250.996	122.260.200
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(88.808.689.468)	(92.486.207.299)
POS LUAR BIASA	D.8	-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(88.808.689.468)	(92.486.207.299)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
SKPD-TP DINAS PUSDATARU PROVINSI JAWA TENGAH
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2018	2017
EKUITAS AWAL	E.1	5.664.620.683	5.966.750.696
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(88.808.689.468)	(92.486.207.299)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.1	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.2	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.3	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.4	-	-
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.5	-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	88.670.104.607	92.184.077.286
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.5	(138.584.861)	(302.130.013)
EKUITAS AKHIR	E.6	5.526.035.822	5.664.620.683

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Skpd-Tp Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

Skpd-Tp Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan No. 2005/BALAP.071/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Entitas berkedudukan di Jalan Madukoro Blok AA-BB Semarang.

Skpd-Tp Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Skpd-Tp Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah berkomitmen dengan visi **“mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan keuangan negara yang efisien, akuntabel dan transparan melalui akuntansi pemerintah menuju Laporan Keuangan Kementerian/Negara yang berkualitas.”** Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Menyelenggarakan yang berkelanjutan berkaitan implementasi akuntansi pemerintah kepada Kementerian Negara/Lembaga.
- Membina secara efektif Kementerian Negara/Lembaga dalam pemanfaatan informasi keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi yang diimplementasikan.
- Mengembangkan sistem yang profesional dan terpercaya.
- Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan

yang andal kepada para pemangku keputusan kepentingan.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2018 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Skpd-Tp Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis
Akuntansi*

A.3. Basis Akuntansi

Skpd-Tp Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Skpd-Tp Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2018 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Skpd-Tp Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Skpd-Tp Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan

berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut

disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang

mempunyai kekuatan hukum tetap.

- b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.

Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan
Aset Tetap*

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan

dikurangi akumulasi penyusutan.

•

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, *Skpd-Tp Dinas PUSDATARU* Prov. Jateng Mengalami revisi POK pada Daftar Isian

Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal tetapi tidak merubah nilai anggaran. Hal ini disebabkan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. berikut sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain:

Uraian	2018	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Jasa	0	-
Pendapatan Lain-lain	0	-
Jumlah Pendapatan	-	-
Belanja		
Belanja Barang	95.505.889.000	95.505.889.000
Jumlah Belanja	95.505.889.000	95.505.889.000

*Realisasi
Pendapatan
Rp76.342.112*

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp76.342.112 atau mencapai 0 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0. Pendapatan Skpd-Tp Dinas PUSDATARU Prov. Jateng terdiri dari Penerimaan Perpajakan dan PNPB dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2018		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Penerimaan Perpajakan	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	76.342.112	-
Jumlah	-	76.342.112	-

Penerimaan Perpajakan TA 2018 sebesar 0 persen dibandingkan TA 2017. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya pelayanan (Perpajakan) akuntansi yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Skpd-Tp Dinas PUSDATARU Prov. Jateng. Selain itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak Skpd-Tp Dinas PUSDATARU Prov. Jateng sebesar Rp76.342.112 yang berasal antara lain dari pendapatan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah dan Penerimaan kembali belanja tahun anggaran yang lalu

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2018 dan 2017

URAIAN	REALISASI TA 2018	REALISASI TA 2017	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa	-	-	-
Pendapatan lain -lain	76.342.112	56.942.604	34,07
Jumlah	76.342.112	56.942.604	34,07

Realisasi Belanja **B.2 Belanja**

Negara
Rp88.765.366.450

Realisasi Belanja instansi pada TA 2018 adalah sebesar Rp88.765.366.450 atau 92.94% dari anggaran belanja sebesar Rp95.505.889.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2018

Uraian	2018		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Barang	95.505.889.000	88.765.366.450	92,94
Total Belanja Kotor	95.505.889.000	88.765.366.450	92,94
Pengembalian	-	-	-
Jumlah	95.505.889.000	88.765.366.450	92,94

Realisasi Belanja TA 2018 mengalami kenaikan sebesar (3.77)% dibandingkan realisasi belanja pada tahun 2017. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Efisiensi Anggaran tahun 2018
2. Sisa terkontrak terhadap pagu

Tugas pembantuan dari belanja barang untuk Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan telah Dilaksanakan *Perbandingan Realisasi Belanja TA 2018 DAN 2017*

URAIAN	REALISASI TA 2018	REALISASI TA 2017	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang	88.765.366.450	92.241.019.890	(3,77)
Jumlah	88.765.366.450	92.241.019.890	(3,77)

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Persediaan

Persediaan
Rp43.937.525

Nilai Persediaan per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp. 43.937.525 dan Rp33.040.600.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan TA 2018 dan 2017

Jenis	TH 2018	TH 2017
Barang Konsumsi	43.587.525	32.850.600
Barang untuk Pemeliharaan	350.000	154.000
Suku Cadang		
Bahan Baku		36.000
Jumlah	43.937.525	33.040.600

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

*Peralatan dan
Mesin
Rp3.462.091.102*

C.2 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah Rp3.462.091.102 dan Rp3.462.091.102. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2017	3.462.091.102
Mutasi tambah:	
Pembelian	0
Hibah Barang	0
Transfer Masuk	0
Koreksi tambah	0
Mutasi kurang:	0
Penghentian dari penggunaan	-
Saldo per 31 Desember 2018	3.462.091.102
Akumulasi Penyusutan s.d.31 Desember 2018	(3.447.644.442)
Nilai Buku per 31 Desember 2018	14.446.660

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Jalan, Jaringan
dan Irigasi
Rp5.006.171.797*

C.3 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp5.006.171.797 dan Rp5.863.187.545. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2017	5.863.187.545
Mutasi tambah:	
Penambahan jaringan teknologi informasi	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2018	5.006.171.797
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2018	(117.263.752)
Nilai Buku per 31 Desember 2018	4.888.908.045

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Akumulasi
Penyusutan
Aset Tetap Rp
(3.564.908.194)*

C.4 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing Rp(3.564.908.194) dan Rp (4.282.996.292). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap TA 2017 dan 2018

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	3.462.091.102	3.447.644.442	14.446.660
2	Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.006.171.797	117.263.752	4.888.908.045
Akumulasi Penyusutan		8.468.262.899	3.564.908.194	4.903.354.705

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Aset Tak
Berwujud
Rp531.250.00
0*

C.5 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah Rp531.250.000 dan Rp531.250.000.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Skpd-Tp Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah berupa Hasil Kajian/Penelitian detail design. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2017	531.250.000
Mutasi tambah:	
Pembelian	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2018	531.250.000
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2018	-
Nilai Buku per 31 Desember 2018	531.250.000

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Aset Tak berwujud TA 2018

Uraian	Nilai Perolehan
Hasil Kajian/Penelitian detail design	531.250.000
Jumlah	531.250.000

*Aset Lain-Lain
Rp244.386.480*

C.6 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah Rp244.386.480 dan Rp244.386.480. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang digunakan dalam operasional entitas.

Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2017	244.386.480
Mutasi tambah:	
- reklasifikasi dari aset tetap	-
Mutasi kurang:	
- penggunaan kembali BMN yang dihentikan	-
- penghapusan BMN	-
Saldo per 31 Desember 2018	244.386.480
Akumulasi Penyusutan	(196.892.888)
Nilai Buku per 31 Desember 2018	47.493.592

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Akumulasi
Penyusutan
dan Amortisasi
Aset Lainnya
Rp(196.892.888)*

C.7 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing Rp(196.892.888) dan Rp(186.338.752). Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud			
Hasil Kajian/penelitian Detai design	531.250.000	0	531.250.000
Jumlah	531.250.000	0	531.250.000
Aset Lain-lain	244.386.480	196.892.888	47.493.592
Jumlah	775.636.480	196.892.888	578.743.592

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Ekuitas
Rp5.526.035.822

C.9 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp5.526.035.822 dan Rp5.664.620.683. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Pendapatan PNB
Rp73.289.216

D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp73.289.216. dan Rp56.942.604. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2018 dan 2017

URAIAN	TH 2018	TH 2017	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa	0	0	0
Pendapatan Lain-lain	73.289.216	56.942.604	28,71
Jumlah	73.289.216	56.942.604	28,71

Pendapatan Lain-Lain merupakan pendapatan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah.

Beban Persediaan
Rp 1.023.709.275

D.2 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 1.023.709.275 dan Rp 1.280.832.400 . Beban Persediaan merupakan

beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan TA 2017 dan 2018

URAIAN	TH 2018	TH 2017	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	1.023.673.275	1.189.933.300	(13,97)
Beban Persediaan Bahan Baku	36.000	85.649.100	(99,96)
Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	-	5.250.000	(100,00)
Jumlah	1.023.709.275	1.280.832.400	(213,93)

*Beban Barang dan Jasa
Rp3.415.502.150*

D.3 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa Tahun 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp3.415.502.150 dan Rp3.668.631.900. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2018 dan 2017

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2018	TH 2017	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan perkantoran	0	0	0,00
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	508.680.000	505.760.000	0,58
Beban Barang Operasional Lainnya	8.804.500	8.800.000	0,00
Beban Bahan	1.155.167.650	1.266.751.900	(8,81)
Beban Honor Output Kegiatan	1.442.210.000	1.502.480.000	(4,01)
Beban Barang Non Operasional lainnya	0	0	0,00
Beban Sewa	284.890.000	371.340.000	(23,28)
Beban Jasa Profesi	15.750.000	13.500.000	0,00
Jumlah	3.415.502.150	3.668.631.900	(35,52)

*Beban
Pemeliharaan
Rp.
81.064.380.96
9*

D.4 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Tahun 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp81.064.380.969 dan Rp84.158.130.440. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Kenaikan beban pemeliharaan karena adanya perbaikan / Maintenance pemeliharaan peralatan dan mesin. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan TA 2018 dan 2017

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2018	TH 2017	NAIK (TURUN) %
Beban pemeliharaan Irigasi	81.064.145.969	84.157.105.440	(3,68)
Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan	235.000	1.025.000	(77,07)
Beban Persediaan Suku Cadang	0	0	0,00
Jumlah	81.064.380.969	84.158.130.440	(80,75)

*Beban
Perjalanan
Dinas Rp.
3.263.155.500*

D.5 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 3.263.155.500 dan Rp. 3.387.447.250. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Penurunan beban perjalanan dinas disebabkan oleh frekuensi rapat koordinasi yang menurun menjelang Lebaran. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2018 dan 2017

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2018	TH 2017	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	2.849.315.500	2.954.647.250	-3,56
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	192.560.000	214.700.000	-10,31
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	221.280.000	218.100.000	1,46
Jumlah	3.263.155.500	3.387.447.250	-12,42

*Beban
Penyusutan
dan Amortisasi
Rp.
149.481.786*

D.6 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp149.481.786 dan Rp170.368.113. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi

untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
TA 2018 dan 2017*

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TH 2018	TH 2017	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	21.663.898	42.550.225	(49,09)
Beban Penyusutan Irigasi	117.263.752	117.263.752	-
Beban Penyusutan Aset tetap yang tidak digunakan pemerintah	10.554.136	10.554.136	-
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	149.481.786	170.368.113	(49,09)

*Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp34.250.996*

D.7 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2018 DAN 2017

URAIAN	TH 2018	TH 2017	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Penyesuaian Nilai Perseediaan	121.235.546	144.567.800	(16,14)
Beban Penyesuaian Nilai Perseediaan	86.984.550	22.307.600	289,93
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	34.250.996	122.260.200	273,79

*Pos Luar Biasa
Rp0.*

D.8 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas.

**E.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN
PERUBAHAN EKUITAS**

*Ekuitas Awal
Rp5.664.620.683*

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp5.664.620.683 dan

Defisit LO

*Rp.
(88.808.689.468)*

Rp5.966.750.696.

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp(88.808.689.468) dan Rp(92.486.207.299). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

*Penyesuaian
Nilai Aset
Rp0*

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

*Koreksi Nilai
Persediaan
Rp0*

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk Tahun 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

*Selisih
Revaluasi Aset
TetapRp0*

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

*KoreksiAset
Tetap Non
Revaluasi Rp0*

E.3.4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Tahun 2018

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	-
Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Lainnya	-
Jumlah	-

*Koreksi Lain-
Lain Rp0*

E.3.5 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

*Transaksi
Antar Entitas
Rp.
88.670.104.607*

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 88.670.104.607 dan Rp92.184.077.286. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas Tahun 2018

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(76.342.112)
Ditagihkan ke Entitas Lain	88.746.446.719
Jumlah	88.670.104.607

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2018, DDEL sebesar Rp. (76.342.112) sedangkan DKEL sebesar Rp88.746.446.719.

*Kenaikan/Pen-
urunan
Ekuitas
Rp.(138.584.861)*

E.5 Kenaikan/Penurunan Ekuitas

Kenaikan/Penurun Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp(138.584.861) dan Rp.(302.130.013)

*Ekuitas Akhir
Rp5.526.035.822*

E.6 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp5.526.035.822 dan Rp5.664.620.683

F.PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Terdapat Keterlanjuran Penyetoran PNBP oleh Wajib Bayar sebesar Rp. 12.494.594 dikarenakan ;

1. Pada Bulan Desember 2018 telah dilaksanakan audit di dinas PU SDA TARU Prov. Jateng. Tim audit mengeluarkan Naskah Hasil Audit yang menerangkan bahwa DI. Kedung Putri terdapat kelebihan perhitungan sebesar Rp. 12.494.594
2. Pada Tanggal 19 Desember 2018 Telah dilakukan Penyetoran Sebesar Rp. 12.494.594
3. Pada Tanggal 2 Januari 2019 keluar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHA) No. 700/02/W.1/2019 yang menerangkan bahwa DI. Kedung Putri terdapat kelebihan perhitungan sebesar Rp. 1.681.060,07
4. Pada tanggal 11 Januari 2019 Dilakukan Penyetoran Sebesar Rp. 1.681.060,07
5. Dengan Keluarnya LHA ke 2 dari inspektorat Maka tindak lanjut hasil audit sebelumnya yaitu point 1 telah gugur.
6. Sehubungan dengan hal tersebut maka telah terjadi kelebihan pengembalian, untuk itu kami mengajukan Surat Permohonan pengembalian PNBP Sebesar Rp. 12.494.594 kepada KPPN Semarang I

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Tidak Ada